

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Didalam sistem perekonomian uang memiliki peranan strategis terutama karena fungsi utamanya sebagai media untuk bertransaksi, sehingga pada awalnya sering diartikan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran. Namun sejalan dengan perkembangan perekonomian, fungsi uang yang semula hanya sebagai alat pembayaran berkembang menjadi alat satuan hitung dan sebagai alat penyimpan kekayaan.

Keberadaan uang dalam sistem perekonomian akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan moneter. Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas moneter dalam menentukan kebijakan dalam kondisi ekonomi suatu wilayah, disamping bank umum yang juga ikut menentukan kondisi perputaran uang dengan ekspektasi dan konsumsi yang dilakukan.

Salah satu kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh BI adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian, dimana kebijakan ini bertujuan untuk mengatur penawaran uang/ mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui bank sentral (Bank Indonesia).

Penawaran uang yang dimaksud adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Perubahan jumlah uang yang beredar secara garis besar dipengaruhi oleh uang inti dan pelipat uang. Besarnya uang inti sangat tergantung pada

tindakan-tindakan yang ditentukan oleh pemerintah khususnya bank sentral. Sedangkan pelipat uang, dilain pihak, disamping dipengaruhi oleh perilaku bank sentral juga ditentukan oleh perilaku agen-agen ekonomi lainnya seperti bank umum dan masyarakat domestik. (Mishkin, 2001)

Konsep uang sangat terkait pada konsep likuiditas, suatu asset likuid adalah asset yang dengan mudah dapat diuangkan dengan tanpa kehilangan resiko rugi. Pada satu sisi ekstrim dari spectrum likuiditas, uang tunai adalah asset yang paling likuid dengan daya beli penuh. Pada tingkat spectrum likuiditas moderat, uang kuasi yang secara definitif tidak secara langsung berfungsi sebagai *medium of exchange*. Pada sisi ekstrim lainnya, asset-asset fisik yang sangat tidak likuid sebagai alat seperti rumah, tanah, obligasi jangka panjang dan sebagainya. (Mishkin, 2011)

Uang beredar sering dikaitkan dengan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga, dsb. Jumlah uang beredar yang terlalu banyak dapat mendorong kenaikan harga barang-barang secara umum (inflasi). Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar terlalu sedikit maka kegiatan ekonomi akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, jumlah uang beredar perlu diatur agar sesuai kapasitas ekonomi. https://nisa8804.wordpress.com/2009/06/23/uang-beredar-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhinya/-_ftn2

Sebagai salah satu variabel ekonomi, penawaran uang atau jumlah uang beredar yang terjadi dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dapat menggeser kondisi perekonomian dari baik keburuk atau sebaliknya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya jumlah uang beredar di Indonesia baik dalam arti luas (M2) maupun dalam arti

sempit (M1), antara lain tingkat suku bunga, giro wajib minimum dan stok uang dalam arti penting. Dalam perkembangannya jumlah uang beredar harus dibatasi, hal ini dilakukan guna membatasi konsumen untuk bersifat konsumtif dan menekan tingkat inflasi (Nilawati, 2000)

Jumlah uang beredar (M1) yaitu uang dalam arti sempit yang terdiri dari uang kartal dan uang giral, dan M2 (uang dalam arti luas) yang terdiri dari M1 ditambah uang kuasi (Nilawati, 2000). Uang kartal (*currencies*) adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Sedangkan uang giral (*deposit money*) adalah uang yang dikeluarkan oleh suatu bank umum.

Perkembangan uang kartal yang beredar di Indonesia selama tahun 2005-2014 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.



Sumber : Bank Indonesia Tahun 2006-2015

Gambar 1.1. Perkembangan Uang Kartal di Indonesia Tahun 2005-2014

Tabel 1.1 menjelaskan perkembangan jumlah uang kartal yang beredar di Indonesia menunjukkan peningkatan selama tahun 2005 hingga tahun 2007.

Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari stabilnya perekonomian nasional dan memberikan dampak positif bagi iklim perbankan di tanah air.

Namun demikian ketika perekonomian dunia dilanda krisis ekonomi global, dampaknya mulai terasa di Indonesia yang menyebabkan iklim perekonomian di tanah air juga ikut berimbas, puncaknya terjadi di tahun 2008. Dimana krisis global memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peredaran uang kartal di Indonesia, bahkan di tahun 2009 pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia terpaksa melakukan kebijakan moneter dengan mengurangi peredaran uang kartal di masyarakat. Dengan berkurangnya uang yang beredar dalam masyarakat menimbulkan turunnya suku bunga bank serta meningkatkan harga-harga kebutuhan barang dan jasa yang pada gilirannya melemahkan daya beli masyarakat.

Selepas krisis ekonomi global, kondisi perekonomian Indonesia kembali mulai pulih sehingga pemerintah dalam hal ini BI mengeluarkan kebijakan untuk menambah jumlah uang untuk digunakan masyarakat dalam aktifitas ekonomi. Perekonomian mulai kembali pulih menggerakkan kembali sektor riil dan sektor-sektor lainnya yang akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat, stabilnya harga barang dan jasa serta dan lainnya.

Kondisi ini bertahan hingga tahun 2011, dimana ketika harga-harga kebutuhan barang pokok dan jasa yang ditandai dengan meningkatnya indeks harga umum menimbulkan pendapatan masyarakat yang sebagian besar habis di konsumsi untuk kebutuhan pokok, seperti pangan, pendidikan dan kesehatan.

Berfluktuatifnya jumlah uang kartal yang beredar dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, dalam penelitian ini faktor-faktor tersebut diantaranya adalah tingkat suku bunga, giro wajib minimum dan indeks harga.

Keynes dalam Mankiw (2003) menyatakan bahwa dalam jangka pendek ketika tingkat suku bunga naik (kebijakan moneter ketat) maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar dan mendorong peningkatan suku bunga. Disisi lain, Keynes juga menyatakan bahwa jumlah uang beredar dapat menaikkan harga-harga, tetapi kenaikan harga-harga itu tidak selalu sebanding dengan kenaikan dalam uang beredar.

Sedangkan menurut Dornbusch (2008) menyatakan bahwa apabila suku bunga dinaikkan atau mengalami peningkatan, maka jumlah uang beredar akan mengalami penurunan. Sebaliknya apabila suku bunga diturunkan atau mengalami penurunan, maka jumlah uang beredar akan mengalami peningkatan.

Indikator lainnya yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Giro Wajib Minimum (GWM) yang salah satu bentuk kegiatan perbankan yang ditetapkan pemerintah (BI) yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan dituntut untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank Indonesia telah banyak merubah kebijakan pemenuhan giro wajib minimum (GWM) pada bank-bank di Indonesia. Setidaknya ada empat Peraturan Bank Indonesia tentang pemenuhan giro wajib minimum pada bank umum sejak November 2010. Peraturan Bank Indonesia yang terakhir, nomor 15/15/PBI/2013, tentang pemenuhan GWM pada bank umum menetapkan persentase pemenuhan

GWM dalam Rupiah sebesar 8% (GWM premier) dan 4% (GWM sekunder) serta 8% GWM dalam valuta asing (BI, Laporan Perbankan, 2013)

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, otoritas moneter menggunakan berbagai target antara melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Pemenuhan GWM merupakan instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan baik jumlah uang beredar maupun suku bunga. Otoritas moneter meningkatkan persentase GWM untuk menurunkan jumlah uang beredar dalam masyarakat. Perbankan diwajibkan menyisihkan sebagian dananya pada Bank Indonesia.

Dengan demikian, dana yang tersalurkan sebagai pinjaman atau kredit akan berkurang. Sehingga jumlah uang beredar dalam masyarakat akan berkurang. Di samping itu, peningkatan GWM akan mengakibatkan suku bunga pinjaman meningkat karena *cost of loanable fund* yang tinggi. Strategi ini biasa disebut dengan strategi kontraksi moneter. Sebaliknya, strategi ekspansi moneter dilakukan dengan menurunkan persentase GWM, sehingga perbankan dapat menyalurkan dananya lebih banyak dan jumlah uang beredar dalam masyarakat akan meningkat.

Tabel 1.1. Suku Bunga, Indeks Harga Umum dan Giro Wajib Minimum Tahun 2005– 2014

Tahun	Suku Bunga (Persen)	Indeks Harga Umum (Persen)	Giro Wajib Minimum (Persen)
2005	5.33	136.86	12,81
2006	6.34	145.89	12,36
2007	6.12	155.50	14,36
2008	9.87	113.86	6.12
2009	6.34	117.03	6.16
2010	5.74	125.17	9.56
2011	4.83	129.91	10.28
2012	4.23	135.49	11.32

2013	6.08	146.84	12.20
2014	5.83	119.00	13.93

Sumber : Bank Indonesia Tahun 2005-2014

Tabel 1.1 jelas terlihat perkembangan beberapa indikator yang mempengaruhi jumlah uang kartal yang beredar. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa manakala suku bunga meningkat, maka indeks harga umum dan giro wajib minimum juga ikut meningkat. Stabilitasnya perekonomian menyebabkan kondisi ini terjadi.

Di tahun 2008 sebagai dampak dari krisis global, dari ke 3 indikator yang dianalisis hanya indikator indeks harga umum dan giro wajib minimum menunjukkan pola penurunan sementara suku bunga terus meningkat. Namun sebaliknya, dampak krisis global baru berimbas kepada suku bunga yang relatif terus mengalami penurunan suku bunga sedangkan kedua variabel lainnya mengalami peningkatan.

Peningkatan yang terjadi pada indeks harga umum dan giro wajib minimum disebabkan salah satunya adalah kebijakan moneter oleh bank sentral yang meningkatkan jumlah uang kartal. Peningkatan jumlah uang kartal dalam masyarakat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan harga-harga barang dan jasa akan meningkat pula yang pada gilirannya akan memicu inflasi.

Suku bunga yang terus menurun menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar dalam masyarakat lebih besar dibandingkan dengan uang yang berada dalam lembaga perbankan, hal ini menyebabkan masyarakat lebih banyak menghabiskan dananya untuk konsumsi baik konsumsi barang dan jasa kebutuhan pokok maupun investasi dalam bentuk asset tak bergerak.

Hingga tahun 2013 kondisi perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan kearah yang lebih baik, dimana ke 3 indikator menunjukkan pola peningkatan yang relatif prporional. Namun di akhir tahun 2014 suku bunga bank dan indeks harga umum mengalami penurunan, hanya giro wajib minimum yang mengalami peningkatan.

Jadi dengan menaikkan tingkat suku bunga (kebijakan moneter ketat) akan mengurangi jumlah uang yang beredar dan mendorong peningkatan suku bunga jangka pendek. Dan apabila *credible*, akan timbul ekspektasi masyarakat bahwa inflasi akan turun atau suku bunga riil jangka panjang akan meningkat. Inflasi yang cenderung mengalami penurunan akan berdampak pada turunnya harga barang dan jasa yang pada akhirnya akan mempengaruhi penawaran uang yang beredar.

Oleh sebab itu jumlah uang yang beredar dalam masyarakat harus sesuai dengan porsinya, manakala jumlah uang beredar berlebih akan memicu peningkatan harga-harga dan akan terjadi inflasi yang tinggi. Sebaliknya, jumlah uang yang beredar terlalu kecil akan menghambat perekonomian itu sendiri.

Dari data dan informasi diatas menunjukkan bahwa selama tahun 200 hingga tahun 2014 suku bunga relatif menurun, sedangkan indeks harga umum dan giro wajib minimum cenderung meningkat, sementara penawaran uang kartal/ jumlah uang kartal yang beredar menunjukkan pola peningkatan di Indonesia. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Uang Kartal di Indoensia".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah apakah ada interdependensi tingkat suku bunga, giro wajib minimum, indeks harga umum dan stok uang terhadap penawaran uang kartal di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah: Untuk menganalisa apakah ada interdependensi tingkat suku bunga, giro wajib minimum, indeks harga umum dan stok uang terhadap penawaran uang kartal di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan informasi bagi otoritas moneter di Indonesia (BI) untuk merumuskan kebijakan moneter dalam mencapai kestabilan perekonomian.
2. Sebagai bahan kajian dan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang moneter khususnya di bidang penawaran uang kartal.